

**ANALISIS KETIDAKSELARASAN
PENGUNAAN LAHAN TERHADAP RENCANA DETIL TATA RUANG
KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015**



PUBLIKASI ILMIAH

**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan
Geografi
Fakultas Geografi**

Oleh:

DION PRABU SEPTA BIMA

E 100 150 169

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KESELARASAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP
RENCANA DETIL TATA RUANG KECAMATAN KALASAN KABUPATEN
SLEMAN**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

DION PRABU SEPTA BIMA

E 100 150 169

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. M. Musiyam, MTP.

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS KETIDAKSELARASAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP
RENCANA DETIL TATA RUANG KECAMATAN KALASAN KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2015**

OLEH

DION PRABU SEPTA BIMA

A 100 150 169

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Geografi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 25 Oktober 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Drs. M Musiyam , M.TP.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Dr. Kuswaji Dwi Priyono M.Si.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dra. Umrotun, M.Si.

(Anggota II Dewan Penguji)


.....
(.....)
(.....)

Dekan,


Drs. H. Priyono M.Si.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surakarta, 28 September 2016



Dion Prabu Septa Bima

ANALISIS KETIDAKSELARASAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP RENCANA DETIL TATA RUANG KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015

Abstrak

Pertumbuhan kawasan perkotaan di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan yang pesat, menyebabkan pertumbuhan penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Kalasan harus dikendalikan agar lahan yang ada digunakan sesuai dengan rencana tata ruangnya agar memperoleh hasil maksimal dari penggunaan lahannya berdasarkan dari kesesuaian lahannya. Apabila tidak dikendalikan akan timbul banyak penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya dan muncul banyak permasalahan dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan dari tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui agihan ketidakselarasan penggunaan lahan di Kecamatan Kalasan dan mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam ketidakselarasan. Metode yang digunakan adalah overlay antara Peta Penggunaan Lahan Aktual dan Peta Rencana Detail Tata Ruang, serta dengan menggunakan Matrix 2 dimensi antara kedua peta tersebut secara kualitatif dikelompokkan menjadi 3 kelas yaitu belum selaras, tidak selaras, dan selaras. Kemudian pada kelas tidak selaras dilakukan survey dan wawancara terhadap responden yang tersebar secara acak berdasarkan kelasnya untuk mengetahui faktor utama yang menyebabkan ketidakselarasan. Berdasarkan pengolahan data dan survey yang dilakukan di Kecamatan Kalasan dari seluas $35.241.292m^2$ sebanyak $112.182.2m^2$ (2,8 %) masuk kedalam kelas tidak selaras, terdiri dari bangunan yang dibangun di pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, tanah kosong, dan sempadan sungai, tersebar merata di seluruh wilayah Kecamatan Kalasan, dan juga berasosiasi dengan jalan. Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi adalah tututan ekonomi dan kebutuhan hidup, kemudian aksesibilitas dengan jalan, serta tingkat resiko kerugian dalam pengolahan pertanian.

Kata Kunci: Keselarasan, Penggunaan Lahan, Kecamatan Kalasan

Abstracts

The growth of urban areas in the district of Kalasan Sleman experiencing rapid growth. The growth of land use in the district of Kalasan must be controlled so that the land is used according to its spatial planning where to obtain the most out of the use of land based on land suitability. If not controlled then there will be a lot of use that is incompatible with the proper functioning it will appear a lot of problems within a period of five to ten years ahead. The main purpose of this study is to determine the distribution of unsuitability land use in Kalasan District and determine the most influential factor in unconformity. The method used is a qualitative method which will be grouped into three classes, unsuitable, suitable, and not suitable yet,. Then do the survey and interviews with respondents randomly scattered by the class to determine the main factors that cause unsuitability. Based on data processing and surveys conducted in Kalasan District of measuring $35.241.292m^2$ there are $112.182 m^2$ (2.8%) is not suitable, composed of buildings constructed on agricultural land liberated, dry land farming, empty land, and the river banks, spread evenly throughout the region Kalasan District, and is also associated with the road. Based on the interview concluded that the main factors that most influence is economy and the necessities of life, and accessibility by road, as well as the level of risk of loss in agricultural processing.

Keywords: Suitability, Landuse, Kalasan District

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, flora dan fauna, serta bentukan hasil budaya. Keadaan nyata lahan sangat penting bagi makhluk hidup karena lahan dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan manusia, pengolahan lahan tersebut dalam bentuk penggunaan lahan. Penggunaan lahan adalah setiap bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual (Jamulya dan Sunarto, 1995).

Seiring berjalannya waktu, dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Pertumbuhannya yang terus bertambah akan diiringi dengan kebutuhan yang meningkat pula. Pemenuhan kebutuhan yang terus bertambah tidak diiringi dengan penambahan lahan, sehingga banyak penggunaan lahan yang dibuat hanya berdasarkan kepentingan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang terkadang melupakan kesesuaian lahannya. Salah satu dampaknya adalah perubahan fisik lahan (ruang) atau konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Kebanyakan dari alih fungsi lahan ini bersifat *irreversible*. Pada kenyataannya telah diketahui bahwa luas lahan sebagai tempat aktivitas penduduk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka dari waktu ke waktu akan terus berkurang. Perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi di suatu daerah terkadang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, seperti yang terdapat dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 1:5000 Tahun 2015. Muatan rencana detail tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, sedangkan rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan budidaya. Adanya peta rencana maka diharapkan dalam pembangunan dapat dievaluasi terarah dan sesuai dengan penataan ruangnya.

Evaluasi penggunaan lahan pada daerah dapat diartikan sebagai usaha untuk pengendalian, penataan, dan perencanaan terhadap perkembangan daerah tersebut. Tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam kurun waktu tertentu seringkali mengalami ketidaksesuaian yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk maupun perkembangan jaman, sehingga akan timbul yang namanya konversi lahan yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan kawasan seperti industri, kompleks perdagangan, perkantoran, dan fungsi strategis lainnya. Ketidakselarasan ini perlu dipantau dengan membandingkan pemanfaatan lahan yang ada saat ini atau eksisting dengan rencana pemanfaatan lahan yang merupakan salah satu materi dalam rencana tata ruang wilayah tersebut (Setiadi, 2006).

Pertumbuhan kawasan perkotaan di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan yang pesat. Adanya hal ini maka pertumbuhan penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Kalasan harus dikendalikan agar lahan yang ada digunakan sesuai dengan rencana tata ruangnya yang mana agar memperoleh hasil maksimal dari penggunaan lahannya berdasarkan dari kesesuaian lahannya. Rencana pengembangan wilayah tersebut hendaknya disusun secara komprehensif dimulai dari tahap identifikasi hingga strategi arahan perkembangan perkotaan Yogyakarta secara berkesinambungan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung wilayahnya. Strategi pengembangan wilayah perkotaan di Kecamatan Kalasan ini, disinergikan dengan rencana tata ruang masing-masing wilayah yang termasuk dalam administrasi Kecamatan Kalasan serta kecamatan di sekitarnya guna tercapainya visi dan misi kawasan tersebut.

Tata ruang / Tata guna tanah yang merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan gambaran implementasi kebijakan pembangunan. Umumnya tata ruang yang dijalankan haruslah memiliki tiga fungsi yaitu fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengaturan (PP 16 Tahun 2004). Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan dilengkapi dengan peraturan zonasi/blok (Undang-undang No 26 Tahun 2007). Muatan rencana detail tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat pemukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, sedangkan rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan budidaya. Adanya peta rencana maka diharapkan dalam pembangunan dapat dievaluasi terarah dan sesuai dengan penataan ruangnya.

Agar kegiatan masyarakat dapat berlangsung secara efisien dan menciptakan keterpaduan dalam pencapaian tujuan pembangunan, perlu dilakukan pengaturan alokasi lahan (Dardak, 2006). Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam pola alokasi investasi yang bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penataan ruang juga bertujuan untuk mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, penataan ruang diharapkan dapat mengefisienkan pembangunan dan meminimalisasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan (Budiharjo, 1997)

Penelitian mengenai analisis keselarasan penggunaan lahan dan faktor yang mempengaruhi ini perlu dilakukan seiring terus berkembangnya daerah di wilayah Indonesia khususnya di Pulau Jawa, karena apabila tidak dikaji akan timbul banyak penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya maka akan muncul banyak permasalahan dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan. Pada tahun 2012 sebesar 30% ($35,84 \text{ km}^2$) dari luas total wilayah Kecamatan Kalasan difungsikan sebagai lahan terbangun dan pada tahun 2015 sudah berubah dan bertambah menjadi 60% dari keseluruhan area, sementara pertumbuhan penduduk di tahun 1990 sebesar 0,97% dan naik menjadi 2,62% pada tahun awal tahun 2000 hingga akhir tahun 2010 yang menandakan pesatnya pembangunan pemukiman serta perdagangan, yang juga didukung karena adanya akses jalan besar yaitu jalan Jogja – Solo , berbatasan dengan Bandara Internasional Adisucipto , dan juga berdekatan dengan objek wisata Candi Prambanan. Kota Yogyakarta sendiri berkembang semakin mengarah ke perbatasan di tepi kota yang disebabkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas di pusat kota maupun di daerah utara dan barat kota Yogyakarta, oleh karena itu, perlu adanya evaluasi agar diketahui faktor ketidakselarasan dan dapat meminimalisir hal serupa di daerah berkembang lainnya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana agihan wilayah yang memiliki ketidakselarasan penggunaan lahan aktual dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman?
2. Faktor utama apakah yang menyebabkan ketidakselarasan antara penggunaan lahan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis agihan wilayah yang memiliki ketidakselarasan penggunaan lahan aktual dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Kalasan.
2. Menganalisis faktor yang menyebabkan ketidakselarasan antara penggunaan lahan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), di Kecamatan Kalasan.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Faktor Ketidakselarasan Penggunaan Lahan

Ketidakselarasan penggunaan lahan terjadi pada umumnya pada lahan yang direncanakan menjadi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, hal ini sangat berkaitan dengan kebutuhan akan lahan yang sangat besar mengakibatkan banyak terjadinya perubahan lahan. Alih fungsi lahan pada dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi, namun kenyataannya konversi lahan menjadi masalah karena terjadi di lahan yang diperuntukkan untuk pertanian yang produktif dalam peraturannya, sehingga tidak cocok atau tidak selaras terhadap yang seharusnya. Faktor penyebab konversi lahan ini dapat dibagi menjadi faktor tidak langsung dan faktor langsung. Faktor tidak langsung antara lain perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi dan konsentrasi implementasi tata ruang, sedangkan faktor langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan sarana transportasi, pertumbuhan kebutuhan lahan untuk industri, pertumbuhan sarana pemukiman dan sebaran lahan sawah.

Berdasarkan kenyataan yang berkembang di masyarakat, pola konversi lahan pertanian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tipe yaitu secara bertahap (*gradual*) adalah terjadi secara sporadis/terpencar yang dilakukan oleh perorangan dan secara seketika (*instant*) bersifat *massive*, yaitu terjadi dalam satu hamparan luas dan terkonsentrasi yang dilakukan oleh proyek baik oleh pihak swasta maupun pemerintah (Widjonarko, dkk., 2006).

Faktor penyebab konversi lahan pada tipe bertahap ada dua yaitu sebagai berikut.

- 1) Lahan sawah dialihfungsikan/dikonversi karena fungsi sawah sudah tidak optimal, misalnya karena telah terjadi degradasi mutu air irigasi dan degradasi mutu tanah sehingga usaha tani tidak dapat berkembang dengan baik.
- 2) Alih fungsi oleh pemiliknya karena adanya desakan untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal dan keperluan tempat usaha untuk meningkatkan pendapatan padahal dari segi fungsinya lahan lahan tersebut masih optimal untuk usaha tani.

Pada tipe seketika dan *massive*, konversi terjadi biasanya diawali oleh alih penguasaan kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya untuk non-pertanian terutama untuk lokasi perumahan. Alih fungsi melalui cara ini terjadi dalam hamparan yang lebih luas dan terkonsentrasi pada satu wilayah yang berdekatan dan pada umumnya berkorelasi positif dengan proses urbanisasi sehingga lebih banyak terjadi di daerah perkotaan atau pinggiran kota.

Nasution, dkk., (2000) memaparkan beberapa faktor yang berperan penting yang menyebabkan proses konversi lahan pertanian ke non pertanian yaitu sebagai berikut.

- 1) Perkembangan standar tuntutan hidup. Hal ini berhubungan dengan nilai *land rent* yang mampu memberikan perkembangan standar tuntutan hidup petani.

- 2) Fluktuasi harga pertanian. Menyangkut aspek fluktuasi harga-harga komoditas yang dapat dihasilkan dari pembudidayaan sawah.
- 3) Struktur biaya produksi pertanian. Biaya produksi dan aktivitas budidaya lahan sawah yang semakin mahal dan cenderung memperkuat proses konversi lahan
- 4) Teknologi. Terhambatnya perkembangan teknologi intensifikasi pada penggunaan lahan yang memiliki tingkat pertanian yang terus meningkat akan mengakibatkan proses ekstensifikasi yang lebih dominan, Proses ekstensifikasi dari penggunaan lahan akan terus mendorong proses konversi lahan.
- 5) Aksesibilitas. Perubahan sarana dan prasarana transportasi yang berimplikasi terhadap meningkatnya aksesibilitas lokal akan lebih mendorong perkembangan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian.
- 6) Resiko dan ketidakpastian. Aktivitas pertanian dengan tingkat resiko ketidakpastian yang tinggi akan menurunkan nilai harapan dari tingkat produksi, harga dan keuntungan, dengan demikian penggunaan lahan yang mempunyai resiko dan ketidakpastian yang lebih tinggi akan cenderung dikonversi ke penggunaan lain yang resikonya lebih rendah.

Menurut Lestari (2005) proses konversi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian yaitu sebagai berikut.

- 1) Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi.
- 2) Faktor internal merupakan faktor yang lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.
- 3) Faktor kebijakan merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

Faktor tersebut yang akhirnya menjadikan para pemilik lahan mengindahkan peraturan yang ada dikawasan yang tidak boleh dikonversikan menjadi lahan terbangun, baik ketika sudah ada sosialisasi tentang peraturan rencana detil tata ruang ataupun belum. Pemerintah atau pihak terkait juga harus turut andil dalam pengendalian penggunaan lahan.

2. METODE

2.1. Teknik Pengambilan Sample

Pengambilan sample dilakukan pada survei lapangan Peta Tentatif Keselarasan Penggunaan Lahan Aktual terhadap Rencana Detail Tata Ruang. Survei lapangan dengan menggunakan metode *Cluster Random Sampling*. Metode *Cluster Random Sampling* berupa metode pengambilan titik sampel berdasarkan persebaran kelompok ketidakselarasan penggunaan lahan pada daerah kajian, namun pengambilan titik sampel dilakukan secara acak. Metode survei lapangan yang digunakan yaitu observasi lapangan dan wawancara. Observasi lapangan yaitu dengan melakukan survei secara langsung populasi sampel berupa ketidakselarasan penggunaan lahan. Sedangkan untuk metode penelitian berupa wawancara, yaitu dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Wawancara dilakukan di objek yang tidak selaras berdasarkan titik sampel yang telah ditentukan.

2.2. Metode Pengolahan Data

Peta penggunaan lahan aktual di olah menggunakan teknik *overlay* dengan peta RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Teknik *overlay* yang digunakan yaitu dengan menggunakan *Intersect*, yang merupakan teknik menggabungkan dua peta atau data spasial beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. Cara kerja *intersect*, yaitu *layer 2* akan memotong *layer 1* untuk menghasilkan *layer output* yang berisi atribut-atribut baik dari tabel atribut milik *layer 1* maupun tabel atribut milik *layer 2*.

2.3. Metode Analisis Data

Analisis kualitatif berdasarkan pada matrix skenario yang dihasilkan. Tabel matrix 2 dimensi skenario hasil *overlay* peta penggunaan lahan dan peta RDTR berfungsi untuk menampilkan keselarasan yang mungkin muncul. Hasil keselarasan yang muncul antara penggunaan lahan dan rencana detail tata ruang selanjutnya dianalisis dengan menilai tingkat keselarasannya, dilakukan kegiatan komparasi yang kemudian diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu selaras (S), belum selaras (BS), dan tidak selaras (TS).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Agihan Ketidakselarasan Penggunaan Lahan

Tabel 1. Tabel Luasan Keselarasan

NO	Klasifikasi	Luas (m^2)	Persentase (%)
1	Selaras	24.825.867	70,44
2	Belum Selaras	9.303.243	26,39
3	Tidak Selaras	1.112.182	2,8
	Total	35.241.292	

Berdasarkan tabel 1, luas wilayah selaras memiliki luas yang paling besar, sedangkan kelas belum selaras menduduki peringkat kedua, sedangkan kelas tidak selaras menduduki peringkat terakhir. Dari hasil di atas klasifikasi ketidakselarasan terjadi pada objek bangunan yang didirikan di area yang tidak ditentukan untuk objek tersebut pada Rencana dasar tata ruang, luasannya juga dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. Tabel Luas Ketidakselarasan Berdasarkan Jenis

No	Ketidakselarasan	Luas (m^2)
1	Bangunan pada Pertanian Lahan Basah	751735
2	Bangunan pada Pertanian Lahan Kering	292403
3	Bangunan pada Sempadan Sungai	66690
4	Bangunan pada Tanah Kosong	1354
	Total	1112182

Berdasarkan tabel 2, jenis ketidakselarasan bangunan yang paling besar ada di peruntukan Pertanian Lahan Basah dimana di peta dapat dilihat bahwa persebarannya dominan berada di kalasan bagian selatan, kemudian ketidakselarasan bangunan pada Pertanian Lahan Kering dimana lebih banyak di temukan di bagian barat Kecamatan Kalasan atau Kelurahan Purwomartani, sementara sempadan sungai berasosiasi dengan sungai dan lahan kosong memiliki luas yang paling rendah di antara keempatnya.

Tabel 3. Luas Ketidakselarasan Berdasarkan Kelurahan

No	Kelurahan/Desa	Luas Ketidakselarasan	Persentase
1	Purwomartani	431066 m^2	39,69 %
2	Tirtomartani	309178 km^2	28,46 %
3	Tamanmartani	180557 km^2	16,62 %
4	Selomartani	165181 km^2	15,21 %

Dari hasil overlay antara Peta Penggunaan Lahan Aktual dan Peta Rencana Detil Tata Ruang ditemukan ketidakselarasan seluas 1112182 m^2 atau 3,15% , dimana ketidakselarasan disebabkan karena bangunan yang di bangun pada kawasan Pertanian Lahan Basah ($751735m^2$), Pertanian Lahan Kering ($292403m^2$) , Tanah Kosong ($66690m^2$,) dan Sempadan Sungai ($1354m^2$). Pola persebaran ketidakselarasan dapat dilihat pada hasil peta, yaitu secara spasial tersebar hampir pada seluruh area Kecamatan Kalasan, namun lebih terpusat dan banyak ditemukan pada area tengah. Agihan ketidakselarasan terasosiasi dengan jalan perkampungan, khusus pada jenis ketidakselarasan yang terdapat di Sempadan Sungai, berasosiasi dengan sungai dan memiliki pola memanjang.

Terdapat pula berbagai jenis pola bangunan pada ketidakselarasan, yaitu bangunan individual, bangunan mengelompok dan juga bangunan seragam contohnya pada objek perumahan.

3.2 Faktor Ketidakselarasan Penggunaan Lahan

Tabel 4. Ketidakselarasan Berdasarkan Faktor Utama

No.	Faktor Ketidakselarasan	Jumlah Sample	Keterangan
1	Faktor Ekonomi dan Kebutuhan Hidup	6	Sample 1 (Pertanian Lahan Basah) Sample 2 (Sempadan Sungai), Sample 6 (Sempadan Sungai), Sample 7 (Pertanian Lahan Kering) Sample 10 (Tanah Kosong) Sample 12 (Tanah Kosong)
2	Faktor Aksesibilitas	3	Sample 3 (Pertanian Lahan Kering) Sample 4 (Pertanian Lahan Kering) Sample 5 (Lahan Pertanian Basah)
3	Faktor Resiko dan Ketidakpastian	3	Sample 8, 9,11 (Pertanian Lahan Kering)

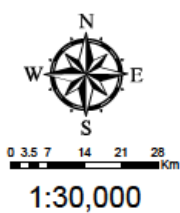
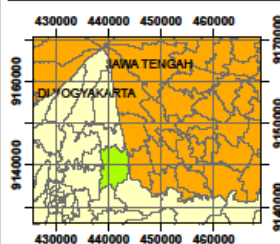
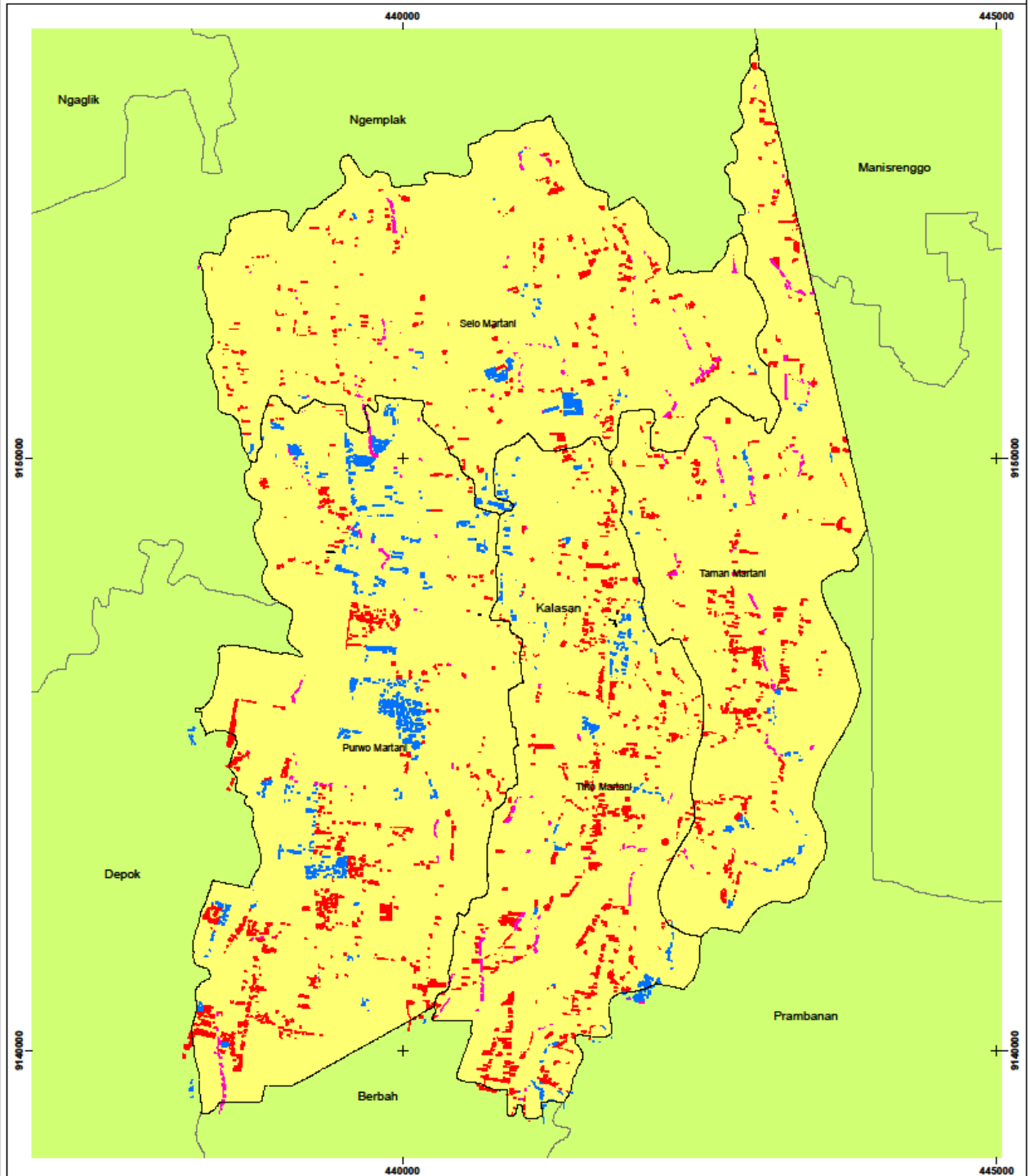
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada faktor ekonomi dan kebutuhan hidup terjadi pada semua jenis peruntukan penggunaan lahan, kemudian untuk faktor aksesibilitas terdapat pada 2 peruntukan pertanian lahan kering dan satu peruntukan pertanian lahan basah. Serta untuk faktor resiko dan ketidakpastian terjadi di 3 peruntukan pertanian lahan kering, karena kondisi tanah yang tandus dan kurang optimal untuk dimanfaatkan.

Berdasarkan faktor dominan yang menyebabkan ketidakselarasannya, pada faktor ekonomi dan kebutuhan hidup terjadi pada semua jenis peruntukan penggunaan lahan, hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi adalah faktor utama tidak karena peruntukan tertentu, faktor ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak pertimbangan untuk membangun suatu lahan, berikutnya adalah faktor aksesibilitas yang terjadi pada lahan pertanian kering dan basah, tentunya karena pada lahan yang dekat dengan jalan sehingga lebih menguntungkan, namun juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan karena berkaitan dengan kemampuan ekonomi dalam hal membeli lahan, namun dapat juga dimungkinkan pemilik lahan asli memilih menjual karena kebutuhan ekonomi, namun lahan ini tetap dipilih untuk dibangun karena aksesnya. Faktor ketiga adalah faktor resiko dan ketidakpastian yang terjadi di 3 sample lahan pertanian kering, hal ini menggambarkan bahwa lahan pertanian kering memiliki resiko yang besar apabila tetap digunakan untuk pertanian, dan tidak menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor Ekonomi dan Kebutuhan hidup menjadi faktor utama

karena adanya faktor lain juga terpengaruh karena faktor tersebut, atau dapat dikatakan meskipun ada faktor lain, namun faktor ekonomi adalah faktor yang pasti selalu ada dibalik alasan suatu pembangunan baik selaras maupun tidak selaras.

Selain ketiga faktor teknis di atas, ketidakselarasan juga dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk, secara garis besar di seluruh Kecamatan kalasan sebanyak 8,32% dari tahun 2014 hingga awal tahun 2016, hal ini tentunya akan selalu bertambah setiap tahunnya, selain itu juga jika dilihat dari pertumbuhan di setiap kelurahannya, Kelurahan yang paling besar pertumbuhan penduduknya maka ketidakselarasan akan semakin tinggi, kemudian seiring dengan hal tersebut kepadatan penduduk baik skala kecamatan maupun tingkat kelurahan akan berdampak pada tingkat ketidakselarasan, karena kebutuhan hunian baik perumahan maupun non-perumahan semakin tinggi, terlihat pada jumlah perumahan yang dibangun pada tiap kelurahan, hal ini juga mengindikasikan bahwa pembangunan perumahan masih banyak yang tidak selaras dengan peruntukannya, khusus untuk hal ini harus ada perhatian khusus dalam menempatkan perencanaan khususnya perumahan maupun permukiman non-perumahan agar tetap sesuai dan selaras

**PETA TENTATIF KETIDAKSELARASAN PENGGUNAAN LAHAN
BERDASARKAN KACAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMAN**



Legenda

Ketidakeelarasan

- Bangunan pada Pertanian Lahan Basah
- Bangunan pada Pertanian Lahan Kering
- Bangunan pada Sempadan Sungai
- Bangunan pada Tanah Kosong

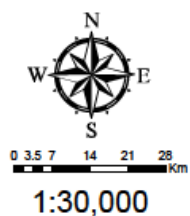
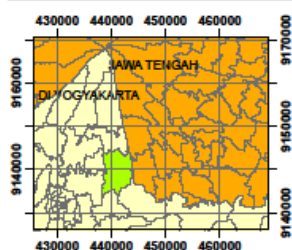
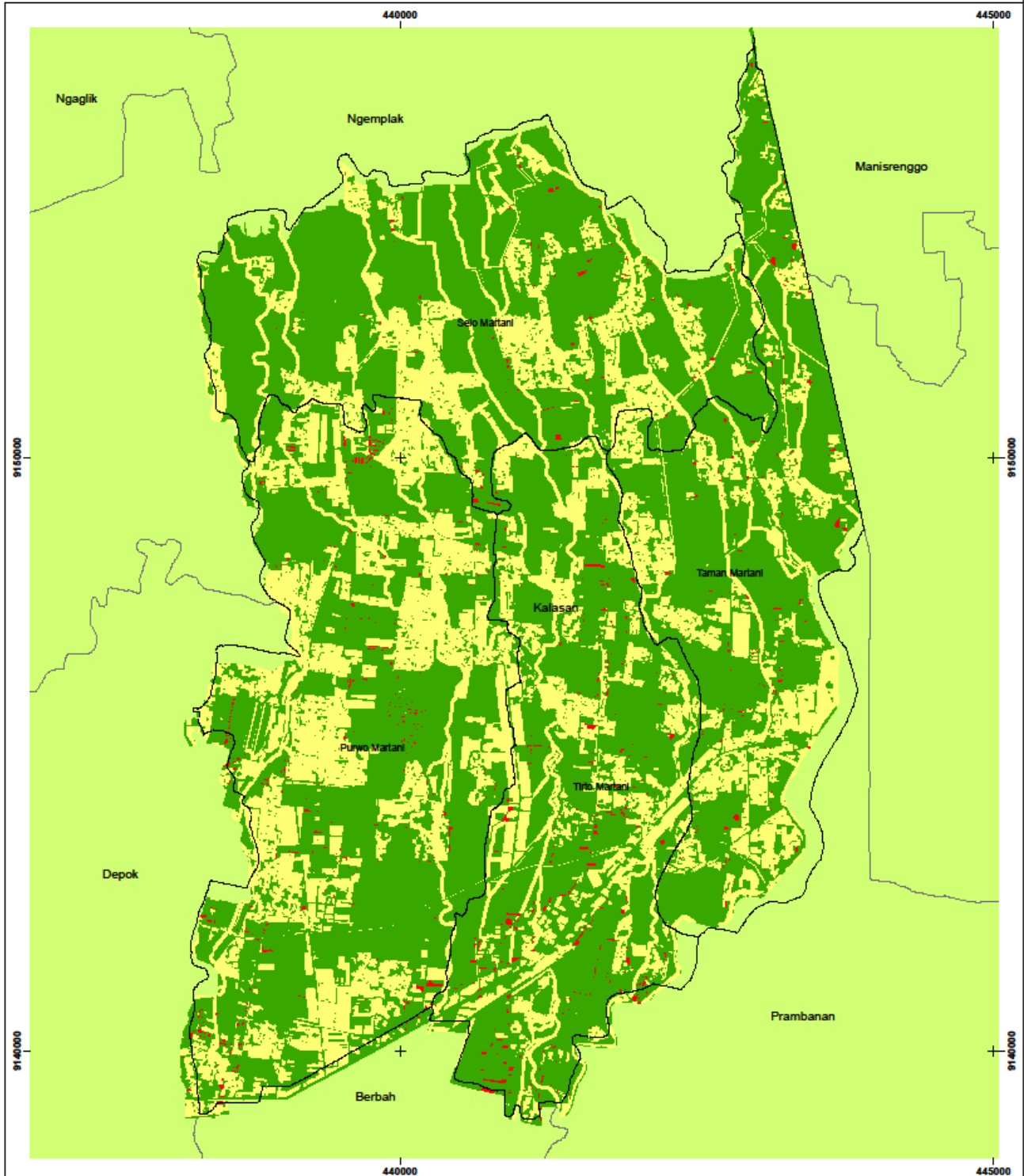
Sumber:

1. Peta Penggunaan Lahan Hasil Interpretasi Citra Ikonos 2015
2. Peta Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2015 (Bappeda)
3. Peta Administrasi Kecamatan (Badan Informasi Geospasial)

Dibuat Oleh:
Dion Prabu Septa Bima
E100150169

FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2016

**PETA TENTATIF KESELARASAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP
RENCANA DETIL TATA RUANG KACAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMAN**



Legenda

Keselarasan	Selaras
Tutupan Awan	Tidak Selaras
Belum Selaras	

Sumber:

1. Peta Penggunaan Lahan Hasil Interpretasi Citra Ikonos 2015
2. Peta Rencana Detil Tata Ruang Tahun 2015 (Bappeda)
3. Peta Administrasi Kecamatan (Badan Informasi Geospasial)

Dibuat Oleh:
Dion Prabu Septa Bima
E100150169

FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Agihan ketidakselarasan penggunaan lahan tersebar hampir diseluruh wilayah Kecamatan Kalasan namun lebih dominan berdekatan dengan jalan utama yaitu Jalan Solo-Jogja. Ketidakselarasan paling tinggi terjadi di Kelurahan Purwomartani sebesar 39,69% dari keseluruhan luas ketidakselarasan.
2. Faktor utama yang berpengaruh dalam ketidakselarasan adalah ekonomi dan kebutuhan hidup yang meningkat, kemudian disusul dengan aksesibilitas lahan, serta resiko dan ketidakpastian yang ada.

4.2 Saran

1. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Rencana Detil Tata Ruang agar dalam pembangunan tidak melanggar peruntukan yang ada, agar dapat terlaksana dengan baik rencana pembangunan yang ada karena apabila sudah terlanjur akan lebih sulit untuk merubah lagi.
2. Perlu adanya koordinasi yang baik antar instansi yang berwenang dalam tata guna lahan, terlebih dalam memberikan ijin mendirikan bangunan harus konsisten dengan rencana yang tentunya sudah disepakati.

PERSANTUNAN

Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Drs Musiyam M.Tp selaku dosen pembimbing skripsi , Dr Kuswaji Dwi P M.Si dan Dra Umrotun M.si selaku dosen penguji skripsi yang telah banyak memberikan bantuan kritik dan saran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Branch, C. Melville. 1996.*Perencanaan Kota Komprehensif*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Cullingworth, Barry and Cullingworth, J. Barry. 1997.*Planning in the USA Policies, Issues, and Processes*. Michigan :
- Jayadinata, Johara T, 1986. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Widjanarko. 2006. *Aspek Pertahanan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (sawah)*. Jakarta: Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah:22-23. Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN.